

BAB IV

UPAYA DAN KETERLIBATAN INDONESIA DALAM MEMAJUKAN ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (AICHR)

Bab empat ini akan membahas lebih rinci mengenai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam keterlibatannya menguatkan AICHR. Akan dijelaskan juga bagaimana Indonesia akan mempengaruhi negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk bersama-sama menguatkan AICHR sebagai lembaga HAM Asia Tenggara yang kuat dan bisa melindungi masyarakat ASEAN.

Dalam rangka perwujudan prinsip-prinsip dan tujuan ASEAN, pembentukan badan HAM di tingkat regional adalah suatu keharusan. Dengan dibentuknya badan HAM tersebut, maka masyarakat ASEAN yang mengalami tindak pelanggaran HAM dapat memperjuangkan haknya di tingkat regional. Hal ini diharapkan untuk terciptanya keadaan yang membuat para pelaku pelanggaran HAM tidak bisa lolos dari tindak hukum di tingkat regional dengan adanya badan HAM ASEAN tersebut.¹

Lebih lanjut, untuk membentuk suatu komisi HAM bukanlah perkara yang mudah, apalagi untuk ASEAN. Hal itu dikarenakan masing-masing negara memiliki komitmen yang berbeda dalam menyikapi pembentukan badan HAM tersebut. Sebagai contoh, Myanmar merupakan negara di kawasan asia tenggara yang paling lemah akan komitmennya terhadap penegakan dan perlindungan HAM. Melihat bahwa di Myanmar sendiri masih terjadi penyelewengan HAM, yang paling baru adalah persoalan Rohingnya yang telah lama bergulir tanpa ada sanksi pasti dari badan HAM ASEAN.

Kemudian Thailand dan Filipina yang mengaku bahwa masing-masing negara telah berkomitmen untuk menegakkan HAM. Selanjutnya, Singapura dan Malaysia tidak sepenuhnya

¹ Sasmini, "Menanti Pembentukan Badan HAM ASEAN", dikutip dari <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009>

berkomitmen tinggi, mereka menunjukkan posisi mereka untuk menegakkan HAM berada di tengah-tengah, tidak berkomitmen kuat namun juga tetap menegakkan HAM sepenuhnya. Meski untuk memenuhi hak daripada masyarakat sipilnya sering dibatasi, akan tetapi dalam hal perekonomian dan sosial, Singapura dan Malaysia bisa dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Indonesia dan Filipina.

Berbagai macam upaya dilakukan Indonesia untuk membuat badan HAM ASEAN menjadi lebih baik lagi, dengan cara mengadakan dialog rutin yang di inisiasi oleh Indonesia sendiri dan juga memberikan rekomendasi-rekomendasi perubahan peraturan mekanisme HAM ASEAN.

A. Melaksanakan dialog-dialog tentang HAM di ASEAN

Dalam upayanya menguatkan AICHR, Indonesia menjalankan berbagai hal yang bisa membuat fondasi AICHR menjadi kuat dan akhirnya AICHR bisa menjadi badan HAM Regional di ASEAN yang bisa melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Tenggara. Salah satu upaya Indonesia dalam menguatkan IACHR yakni mengadakan dialog-dialog yang berkaitan dengan HAM. Dialog-dialog ini dilakukan di Indonesia dan yang menginisiasi adalah perwakilan AICHR dari Indonesia sendiri, yang saat itu masih dipimpin oleh Rafendi Djamin. Berikut adalah beberapa dialog yang telah dilaksanakan Indonesia sebagai salah satu upayanya untuk menguatkan AICHR:

1. Debat Publik: "Mekanisme HAM ASEAN Pasca 2015 - Perspektif Indonesia"

Lebih dari seratus (100) pemangku kepentingan nasional utama yang berasal dari berbagai instansi mulai dari instansi pemerintah, akademisi, media, masyarakat madani, dan anggota

korps diplomatik yang berkumpul di Erasmus Huis pada hari Selasa, 21 April 2015. Untuk Debat Publik yang berjudul "*Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN Pasca 2015 - Perspektif Indonesia*", yang diselenggarakan oleh Perwakilan Indonesia untuk *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, dan didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Dalam sambutannya, Bapak Rafendi Djamin, Perwakilan Indonesia untuk AICHR, menyampaikan harapannya bahwa partisipasi aktif semua pemangku kepentingan utama dapat memberikan masukan dalam memperkuat mekanisme hak asasi manusia ASEAN yang ada².

Selanjutnya, M. Chandra Widya Yudha, Direktur Kerjasama Politik-Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri Indonesia, menyoroti bahwa Indonesia telah memberikan perhatian khusus pada hak asasi manusia dalam *ASEAN Vision 2025* - yaitu melalui penguatan mandat AICHR, Pelembagaan dialog hak asasi manusia, penguatan undang-undang hak asasi manusia nasional di negara-negara anggota ASEAN (AMS), mendorong ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional oleh AMS, dan mendorong pembentukan konvensi hak asasi manusia regional.³

Dr. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI 2001-2009, menyampaikan pidato utama untuk

² <http://aichr.org/activities/public-debate-asean-human-rights-mechanism-post-2015-an-indonesian-perspective/>
diakses pada 16 Oktober 2017.

³ Ibid.

memulai diskusi. Dr. Wirajuda memberikan penjelasan komprehensif tentang pengembangan hak asasi manusia, baik secara nasional di Indonesia, maupun regional di seluruh ASEAN. Dia menyatakan bahwa Indonesia perlu berani dan tegas dalam mempraktikkan diplomasinya jika Indonesia ingin terus memainkan peran penting di ASEAN. Beliau juga mengingatkan prinsip *non-intervensi* telah ditafsirkan secara dinamis secara internasional, dan menambahkan bahwa Deklarasi dan Rencana Aksi Wina (VDPA) menyatakan bahwa setiap pelanggaran berat hak asasi manusia adalah masalah yang menjadi perhatian internasional. Apalagi ia mengakui peran penting masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi dan HAM. Dia menekankan bahwa perkembangan HAM yang terakhir di ASEAN harus sejajar dengan perkembangan demokrasi, mengingat bahwa masih ada kekurangan demokrasi di kawasan ini. Demikian pandangannya, adalah visi menuju ASEAN 2025 dalam konteks hak asasi manusia.

2. Press Release: The AICHR Follow-Up Workshop on Post Millennium Development Goals 2015 and Human Rights

AICHR menyelenggarakan *Workshop* tersebut di Hotel Four Seasons, Jakarta pada tanggal 15-16 Oktober 2014. Konferensi *Workshop* ini sejalan dengan rekomendasi *Workshop* AICHR sebelumnya mengenai Post MDGs dan Hak manusia yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan November 2013 dan juga dengan Program Prioritas AICHR dari tahun 2013 yang telah

menyelenggarakan beberapa kegiatan terkait dengan pencapaian MDGs⁴.

Dalam sambutannya, Bapak Rafendi Djamin, Perwakilan Indonesia untuk AICHR, menjelaskan bahwa tujuan dari *workshop* ini adalah, melalui amanat AICHR dalam ToR AICHR, antara lain untuk mengembangkan pendekatan dan posisi yang sama. Hak asasi manusia untuk kepentingan ASEAN⁵.

Workshop yang diadakan selama dua hari tersebut membahas bagaimana 17 usulan *Sustainable Development Goals* (SDG) dapat diterjemahkan dalam konteks ASEAN. Ini juga membahas tentang bagaimana menguraikan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia di SDG baru di ASEAN dan akses terhadap Keadilan dan Pembangunan di SDG yang baru. Peserta lokakarya juga menukar pandangan mereka tentang bagaimana ASEAN dapat melibatkan dan mempengaruhi agenda pembangunan pasca 2015 setelah diadopsinya SDG, berdasarkan Visi ASEAN Post 2015 yang sekarang sedang dirumuskan yang dipimpin oleh Dewan Koordinasi ASEAN (ACC)⁶.

Workshop ini dihadiri oleh perwakilan AICHR dan Perwakilan Alternatif dari beberapa Negara Anggota, Perwakilan dari Badan Sektor ASEAN yang relevan, Focal point Nasional MDG's dari Negara-negara Anggota ASEAN, Lembaga-lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dari Negara-negara ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan masyarakat sipil nasional dan regional

⁴ <http://aichr.org/press-release/press-release-the-aichr-follow-up-workshop-on-post-millennium-development-goals-2015-and-human-rights/> diakses pada 16 Oktober 2017.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Organisasi masyarakat dari daerah Yang juga hadir adalah pengamat dari badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, instansi pemerintah dan mitra lainnya. Lokakarya ini diselenggarakan oleh AICHR yang dipimpin oleh Perwakilan RI untuk AICHR dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Pusat Regional Asia Pasifik (UNDP).

3. *Workshop* Regional AICHR tentang Tujuan Pembangunan Milenium Pos 2015 d Komisi Antarpemerintah untuk Hak Asasi Manusia

AICHR menyelenggarakan *workshop* Regional untuk Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) 2015 dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Indonesia, dari tanggal 11-12 Desember 2013. *Workshop* Regional tersebut diselenggarakan oleh AICHR Indonesia dengan dukungan Dari Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Perwakilan dari Pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Filipina, Viet Nam, Singapura, Thailand dan Sekretariat ASEAN turut hadir. Selain itu, perwakilan dari Badan Sektor ASEAN lainnya adalah Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, Organisasi Masyarakat Sipil nasional dan regional, sektor bisnis serta UNDP, OHCHR dan UN Women juga menghadiri *workshop* tersebut.

Workshop tersebut membahas beberapa topik yang relevan dengan perkembangan MDGs saat ini, antara lain perkembangan dan konvergensi terbaru dari 3 proses global, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), Tujuan Pembangunan Milenium

(*Millennium Development Goals / MDGs*)⁷, dan Pembangunan Pascaperang 2015 Proses agenda Beberapa Perwakilan dari Negara-negara Anggota ASEAN juga berbagi pengalaman mereka dan mengidentifikasi pencapaian dan tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip dan kerangka kerja HAM dalam mencapai MDGs di negara mereka sampai tahun 2015. Selanjutnya, *workshop* tersebut juga sebagai ajang bertukar pengalaman dari Eropa dan Afrika dalam mengimplementasikan MDGs.

Workshop tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi antara lain; untuk mendorong AICHR untuk lebih terlibat dalam diskusi dengan badan-badan Sektor ASEAN terkait mengenai *Roadmap* ASEAN yang ada mengenai pencapaian MDG's sampai 2015⁸, serta komitmen untuk berpartisipasi dalam proses global. Dalam merumuskan prinsip dan kerangka kerja HAM dalam agenda pembangunan pasca 2015.

4. Membangun Komunitas ASEAN Bebas Penyiksaan

Perwakilan Indonesia untuk *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) menyelenggarakan Dialog HAM kedua Jakarta tentang "Pencegahan Penyiksaan di kawasan ASEAN", pada 2-3 November 2013 di Grand Hyatt, Jakarta.

Dialog Hak Asasi Manusia Jakarta merupakan prakarsa dari Perwakilan Indonesia untuk AICHR,

⁷ <http://aichr.org/news/aichr-regional-workshop-on-millennium-development-goals-post-2015-and-human-rights/> diakses pada 16 Oktober 2017.

⁸ *Ibid.*

Rafendi Djamin, untuk memajukan isu-isu hak asasi manusia di daerah-daerah. Dialog tersebut mengundang para pemangku kepentingan di kawasan ASEAN, yaitu Perwakilan AICHR, pejabat pemerintah dari masing-masing negara anggota ASEAN, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia di Wilayah ASEAN, badan-badan PBB di wilayah ini, akademisi, pejabat dari kedutaan asing di Jakarta, Pejabat Sekretariat ASEAN dan sebagainya. Dialog tersebut juga mengundang para ahli dari mekanisme hak asasi manusia di luar wilayah - yaitu dari Eropa dan Amerika - untuk berbagi pengalaman mereka dalam bekerja dengan pencegahan penyiksaan.

Salah satu alasan untuk memilih pencegahan penyiksaan karena tema keseluruhan Dialog HAM kedua Jakarta adalah modalitas bersama di dalam ASEAN dimana semua anggota memiliki undang-undang yang melarang penyiksaan. Apalagi, para Kepala Negara ASEAN telah sepatat untuk mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN pada bulan November 2012, yang melarang praktik semacam itu. Pasal 14 dari AHRD menetapkan bahwa: "Tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia."⁹

"Penyiksaan adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan serius. Dan AICHR memiliki mandat untuk mengembangkan strategi untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia di masyarakat ASEAN yang akan datang pada tahun 2015. Oleh karena itu, sebagai

⁹ <http://aichr.org/report/building-a-torture-free-asean-community/>
diakses pada 16 Oktober 2017.

perwakilan Indonesia untuk AICHR, saya mengambil inisiatif ini, Salah satu hasil dari dialog hari ini adalah menggarisbawahi, dengan suara bulat Kesepakatan dari lantai, Komunitas ASEAN harus menjadi komunitas bebas penyiksaan, "kata Rafendi di Jakarta (2/11)¹⁰. Salah satu fungsi AICHR, seperti yang digariskan dalam TOR AICHR adalah untuk mendukung dan mendorong Negara-negara anggota ASEAN untuk meratifikasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional.

Dalam hal ini, salah satu masalah mendasar yang dibahas selama dialog adalah disparitas standar hak asasi manusia di ASEAN, karena tidak semua anggota ASEAN telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (CAT). Sampai sekarang lima negara telah meratifikasi CAT (Kamboja, Laos, Indonesia, Thailand dan Filipina); dua negara telah meratifikasi Protokol Opsional untuk CAT atau OPCAT (Filipina dan Kamboja); dan dua negara sedang dalam proses meratifikasi protokol opsional (Thailand dan Indonesia).

"Ini menjadi perhatian penting, mengingat Komunitas ASEAN yang akan datang yang akan membuka kerja sama yang lebih besar antara negara-negara ASEAN. AICHR diharapkan dapat meningkatkan standar HAM di kawasan ASEAN, "kata Rafendi. Dalam beberapa tahun terakhir, isu hak asasi manusia menjadi jauh lebih penting di kawasan

¹⁰ Ibid

ASEAN, sejalan dengan intensifikasi proses pembentukan Komunitas ASEAN 2015.¹¹

5. Dialog HAM ASEAN dengan Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia mengundang Perwakilan dari Komisi Antar pemerintah untuk Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) untuk dialog Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2013, di Sekretariat ASEAN. Dialog ini akan menjadi forum bagi Indonesia dan AICHR sebagai mekanisme regional hak asasi manusia untuk membahas isu-isu terkait hak asasi manusia. Hasil dari dialog ini akan digunakan untuk meningkatkan upaya Indonesia dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia, dan juga akan bermanfaat bagi situasi hak asasi manusia di wilayah ini. Dialog ini merupakan perkembangan situasi upaya Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di “lapangan” serta dalam menghadapi tantangan yang dihadapi.¹²

Pemerintah Indonesia akan membagikan program dan kegiatan nasionalnya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, seperti pelatihan hak asasi manusia, ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional, tujuan Pembangunan Milenium, serta perlindungan hak perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa dialog HAM dengan AICHR, sebagai institusi menyeluruh untuk hak asasi manusia di ASEAN, akan memberi kontribusi

¹¹ Ibid

¹² <http://aichr.org/news/asean-human-rights-dialogue-with-the-government-of-indonesia/> diakses pada 16 Oktober 2017.

signifikan bagi pencapaian ASEAN dalam masalah hak asasi manusia.

6. Siaran Pers Diskusi Meja Bundar dan Rapat Koordinasi Pertama Studi Tematik AICHR tentang Migrasi dan Hak Asasi Manusia

Indonesia menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar dan Rapat Koordinasi Pertama dari studi tematik AICHR tentang Migrasi dan Hak Asasi Manusia di Bandung pada tanggal 5-6 November 2012. Kedua pertemuan tersebut merupakan diskusi awal studi tematik AICHR tentang migrasi dan hak asasi manusia di ASEAN, Yang mana Indonesia adalah negara utama untuk studi tematik ini. Diskusi Meja Bundar difasilitasi oleh Perwakilan Indonesia untuk AICHR dan dihadiri oleh beberapa pembicara dari berbagai Organisasi Internasional serta perwakilan pemangku kepentingan yang berbeda di Asia Tenggara.

Studi tematik AICHR tentang migrasi dan hak asasi manusia bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam proses migrasi di wilayah ini. Telah dipahami bahwa ketidaksetaraan distribusi peluang dunia telah menjadi dorongan utama untuk migrasi¹³. Namun demikian, migrasi telah diakui sebagai komponen penting kehidupan ekonomi dan sosial setiap Negara Bagian, dan bahwa migrasi yang dikelola dengan baik dapat bermanfaat bagi individu dan masyarakat, serta negara-negara pengirim dan penerima.

¹³ <http://aichr.org/press-release/press-release-of-the-round-table-discussion-and-the-first-coordination-meeting-of-the-aichr-thematic-study-on-migration-and-human-rights/>

diakses pada 16 Oktober 2017.

Banyak tantangan yang kompleks telah menyertai proses migrasi. Beberapa masalah sebagian besar terkait dengan kurangnya akses terhadap bentuk migrasi reguler dan jalur migrasi yang aman. Di negara-negara ASEAN, migrasi telah mengambil berbagai bentuk, seperti migrasi reguler dan tidak teratur, dimana sebagian besar individu di kedua kategori rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan sangat membutuhkan perlindungan. Kelompok yang paling rentan yang telah diidentifikasi dalam proses migrasi di ASEAN antara lain: pekerja migran, orang-orang yang diperdagangkan termasuk perempuan dan anak-anak, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal internal (IDP), orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak memiliki kewarganegaraan, pencari suaka dan pengungsi; dan perkawinan antar-nasional. Diskusi Meja Bundar dan Rapat Koordinasi Pertama telah membahas kerangka kerja mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh ASEAN untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses migrasi, terutama kelompok rentan.

B. Memberikan Rekomendasi Perubahan Lembaga HAM ASEAN

Indonesia menjadi negara yang turut memperjuangkan HAM di Asia Tenggara, juga menjadi salah satu negara penggerak utama dalam pembentukan AICHR. Meskipun pada kenyataannya kondisi HAM di Indonesia sendiri masih mengalami banyak permasalahan terkait pelanggaran HAM, akan tetapi terlepas dari persoalan tersebut, Indonesia telah lama memperjuangkan pembentukan mekanisme HAM di kawasan Asia Tenggara sendiri. Pada tahun 1991, Indonesia “berani” menjadi tuan rumah dalam acara *Regional Conference on Human Rights* di

Jakarta. Sebelum Konferensi Dunia di Wina, 25 Juni 1993, cikal bakal Komnas HAM juga sudah terbentuk dengan Keppres No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komnas HAM tanggal 7 Juni 1993¹⁴.

Hingga kini komitmen Indonesia dalam memajukan AICHR juga terus ditunjukkan, diantaranya dengan inisiatif melakukan Dialog HAM dengan AICHR meniru konsep UPR (*Universal Periodical Review*), sistem pelaporan HAM Dewan HAM PBB-Jenewa. Pada tanggal 25 Juni 2013, Indonesia menjadi negara anggota pertama yang secara sukarela menyampaikan ke negara-negara ASEAN lainnya melalui AICHR untuk ditinjau proses promosi dan proteksi HAM di Indonesia. Dengan inisiatif ini, Indonesia telah melaksanakan salah satu butir Terms of Reference AICHR, yaitu butir 4.10: *“To obtain information from ASEAN Member States on the promotion and protection of human rights.”*¹⁵

Dengan hadirnya Piagam ASEAN dan AICHR dalam tubuh ASEAN, merupakan kemajuan yang sangat baik terhadap komitmen politik masing-masing anggotanya. Beberapa negara di kawasan ASEAN, yakni Vietnam dan Myanmar yang telah menunjukkan setidaknya kepeduliannya untuk memajukan HAM di ASEAN, bahkan sekarang Myanmar telah memiliki badan HAM nasional sendiri. Meski proses pemajuan AICHR berjalan lamban, peran AICHR sangat penting dalam pemajuan HAM di kawasan Asia Tenggara,

¹⁴ <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1000-mengurai-peran-indonesia-dalam-penguatan-aichr> diakses pada 20 Oktober 2017.

¹⁵ <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1000-mengurai-peran-indonesia-dalam-penguatan-aichr> diakses pada 20 Oktober 2017.

setidaknya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masing-masing negara anggotanya akan pentingnya penegakan HAM di kawasan Asia Tenggara.

Seiring berjalannya AICHR, banyak piha menilai bahwa lembaga HAM ASEAN tersebut belum berjalan sesuai apa yang dimandatkan. Sebagai lembaga HAM yang seharusnya bisa menjadi tempat pelindung bagi masyarakat Asia Tenggara, AICHR seharusnya bisa menyelesaikan persoalan HAM yang telah lama menjadi polemik di kawasan. Wajah kebobrokan HAM sepertinya terus diperlihatkan ketika lembaga HAM tersebut sudah berdiri akan tetapi penyelewengan dan pelanggaran terhadap HAM semakin menjadi dan badan tersebut tidak bisa “masuk” ke dalam permasalahan HAM dan sampai pada titik dimana badan HAM itu tidak pernah memberi sanksi tegas kepada para pelaku pelanggaran HAM.

Tidak bisa dipungkiri bahwa proses perumusan instrumen HAM yang ada di ASEAN cukup pelik dan menimbulkan banyak krtik, terutama dengan belum dilakukannya berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sipil ASEAN. Indonesia perlu mendorong dilakukannya review terhadap beberapa instrumen HAM ASEAN guna memperkuat mekanisme tersebut. Tahun 2014 menjadi waktu yang tepat untuk dilakukannya review sesuai dengan komitmen awal AICHR untuk melakukan review setiap 5 tahun sekali.

Untuk mengevaluasi kembali kinerja AICHR, Indonesia memberikan gagasan untuk memberi

rekomendasi perubahan lembaga HAM ASEAN, sebagai berikut¹⁶:

1. Adanya ketentuan dalam *ToR* AICHR untuk melakukan revisi terhadap mandat Komisi HAM ASEAN. Usulannya diperkuat dengan melakukan *monitoring* dan pemberian hukuman bersifat mengikat kepada negara ASEAN yang tergabung di Lembaga HAM ASEAN.
2. Memperkuat hubungan dan relasi dengan lintas komponen masyarakat sipil secara regional guna mengaktifkan partisipasi yang masif untuk lebih ketat dalam mengawal HAM.
3. Memasukan dan memaksimalkan mekanisme *local wisdom* yang terdapat di berbagai negara ASEAN dalam penyelesaian Pelanggaran HAM.
4. Melakukan penyesuaian dan harmonisasi dengan institusi/komisi pemerintah yang dimandatkan menyelesaikan pelanggaran HAM.
5. Segala kebijakan yang dibuat Lembaga HAM ASEAN harus mengedepankan prinsip inklusif, transparan dan akuntabilitas.
6. Revisi kembali mandat Komisi HAM ASEAN karena tidak mengoptimalkan instrumen HAM internasional yang disepakati dan regulasi dalam negara ASEAN masing-masing.

¹⁶ “Apa Guna Deklarasi HAM ASEAN?”, <http://www.setara-institute.org/id/content/apa-guna-deklarasi-ham-asean>, dapat dilihat di: <http://www.alumni.unair.ac.id> diakses pada 22 Desember 2017.

Selanjutnya, Indonesia harus membuat negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga yang mereka bentuk dan sepakati bersama. Pada prinsipnya, tidak ada satu pun negara di ASEAN yang kebal akan proses HAM di tingkat internasional¹⁷.

Indonesia menjadi negara yang terdepan dalam memajukan HAM, kesungguhan Indonesia tersebut terlihat dari terbentuknya KOMNAS HAM di Indonesia tahun 1993¹⁸. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, dalam pertemuannya dengan perwakilan Indonesia untuk *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), Dina Wisnu, di sela-sela acara *Asean Foreign Ministers Meeting* (AMM) ke-49 di Vientiane, Laos. Retno menambahkan Indonesia juga telah berkomitmen dalam memajukan HAM di kawasan ASEAN.

"Pertemuan saya dengan wakil Indonesia di AICHR, pokok yang pertama adalah Indonesia dalam hal ini sepakat atau berkomitmen tinggi untuk memajukan hak asasi manusia di ASEAN. Indonesia selalu ada di lini paling depan pada saat kita membahas mengenai upaya tidak saja dalam hal mempromosikan tetapi juga dalam hal perlindungan hak asasi manusia," ungkap Retno LP Marsudi di Hotel Landmark, Vientiane, Laos, Sabtu (23/7/2016)

¹⁷ Ibid

¹⁸ <http://news.detik.com/berita/3259718/bertemu-aichr-indonesia-berkomitmen-memajukan-ham-di-asean> diakses pada 9 Oktober 2017.

"Kita juga siap untuk memberikan share informasi, share pengalaman, mengenai apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka untuk mempromote dan memprotect human rights ini. Misalnya sudah lama sekali Indonesia sudah memiliki Komisi HAM. Dan itu salah satu proses yang bisa kita sampaikan atau kita bagi kepada saudara-saudara kita negara anggota ASEAN," tambahnya. Retno juga menjelaskan, selain pembicaraan mengenai HAM, dirinya juga membicarakan soal perlindungan terhadap buruh migran. "Di setiap pertemuan ASEAN kita selalu membawa isu mengenai buruh migran itu ke semua pertemuan. Memang masih ada beberapa hal yang harus kita masih memerlukan waktu untuk dibahas. Tapi perjuangan Indonesia untuk hak-hak itu tetap dilakukan," tutur mantan Dubes RI untuk Belanda tersebut.¹⁹

Walaupun pada awal pembentukannya AICHR masih banyak yang merasa pesimis dengan keberadaan AICHR, namun Indonesia menjadi salah satu negara yang selalu optimis akan kemajuan AICHR. Indonesia dalam perannya menguatkan AICHR telah berkembang seiring berjalannya waktu. Mengadakan diskusi dan dialog tentang HAM yang telah dilakukan tiap tahunnya menjadi salah satu agenda penting Indonesia dalam menguatkan AICHR yang sedari awal memiliki komitmen tinggi dalam pemajuan mekanisme HAM ASEAN.

Komitmen Indonesia masih terus berjalan hingga akhirnya pada tanggal 25 Juni 2013, Indonesia menjadi negara anggota pertama yang secara sukarela berinisiatif menyampaikan ke negara-negara ASEAN

¹⁹ Ibid.

melalui AICHR untuk ditinjau proses promosi dan proteksi HAM di Indonesia. Dari sini dapat terlihat bagaimana Indonesia secara tidak langsung bisa mempengaruhi negara-negara anggota lain di kawasan Asia Tenggara untuk terus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penegakan HAM meskipun dalam prosesnya banyak terhambat dan masih berjalan lambat, namun Indonesia selalu optimis untuk mengoptimalkan AICHR sebagai badan HAM regional di Asia Tenggara. Padahal, Indonesia memiliki standar yang cukup tinggi dalam hal perlindungan HAM. Namun, standar ini tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kerja AICHR. Menurut Rafendi Djamin, mantan ketua umum AICHR periode sebelumnya, Indonesia tentu tidak bisa memaksakan kehendak, Indonesia harus akomodatif tetapi dengan catatan tidak mengorbankan visi itu sendiri²⁰.

Rafendi Djamin mengatakan bahwa Indonesia bisa optimis melalui pembentukan AICHR ini, maka perlindungan HAM di kawasan ASEAN menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Menurut Rafendi, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbukti memiliki mekanisme perlindungan HAM yang lebih baik. Dan, pengalaman tersebut perlu dibagikan pada negara-negara lain di ASEAN²¹.

Menurut Ifdhal Kasim, mantan ketua KOMNAS HAM, AICHR akan sulit bekerja jika tidak ada dukungan dari tingkat nasional. Maka dari itu AICHR seharusnya berkepentingan untuk mendorong pembentukan komisi HAM tingkat nasional yang

²⁰ Heppy Ratna, "AICHR dan Penguatan Perlindungan HAM di ASEAN", <https://www.antarane.ws.com/berita/159071/aichr-dan-penguatan-perlindungan-ham-di-asean> diakses 16 Oktober 2017

²¹ Ibid.

nantinya dapat menjadi mitra²². Komnas HAM, misalnya, berharap AICHR mampu meningkatkan pelembagaan HAM di ASEAN. Harapan ini berangkat dari fakta bahwa hanya empat dari sepuluh negara anggota ASEAN yang sudah memiliki komisi HAM tingkat nasional. Keempat negara dimaksud adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Sayangnya, harapan Komnas HAM tidak sejalan dengan rencana AICHR. Merujuk pada rancangan program kerja AICHR untuk periode lima tahun, Ifdhal tidak melihat adanya program mempercepat akselerasi mendorong enam negara anggota ASEAN yang belum memiliki komisi HAM di tingkat nasional²³.

Meskipun tidak tercantum dalam program lima tahunan, ada harapan bahwa Indonesia akan memainkan peranan penting ketika nanti memimpin AICHR. Indonesia, menurutnya, harus berperan aktif dalam mendorong agar kawasan ASEAN memiliki mekanisme proteksi HAM yang memadai. Salah satu peran itu adalah menginisiasi enam negara ASEAN untuk membentuk komisi HAM tingkat nasional.

Hal lain yang menjadi perhatian Komnas HAM adalah tingkat ratifikasi negara-negara ASEAN terhadap instrumen-instrumen HAM internasional. Indonesia patut membanggakan diri karena termasuk negara yang paling banyak meratifikasi instrumen HAM internasional. Sementara, yang termasuk minim ratifikasi adalah Laos, Vietnam, dan Brunei. “Tujuh

²² “AICHR Perlu Dorong Peningkatan Pelembagaan HAM”, www.hukumonline.com diakses pada 25 Agustus 2017.

²³ Ibid.

kovenan pokok ILO rendah di kawasan ASEAN sendiri,” Ifdhal mencontohkan²⁴.

Mantan Ketua Komnas HAM Marzuki Darusman memandang kepemimpinan Indonesia di AICHR adalah momen penting yang tidak bisa dilewatkan. Untuk itu, Marzuki mengatakan seluruh elemen, khususnya Komnas HAM dan masyarakat sipil perlu duduk bersama merumuskan sejumlah masukan agar kepemimpinan Indonesia di AICHR benar-benar memiliki arti.

²⁴ Ibid.